

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024 meliputi peran untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan cara melakukan kerjasama dengan aparat keamanan, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk melakukan patroli dan pengawasan. Peran dalam mengawasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang dengan cara melakukan sosialisasi dan pengawasan melalui kerjasama dengan masyarakat. Peran untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye dengan cara mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, para ASN dan Forkopimcam yang ada di wilayah tersebut, serta peran untuk mengawasi pelaksanaan putusan keputusan dengan cara mengkaji dan menyelaraskan peraturan dari KPU dan peraturan dari Bawaslu terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu.

2. Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Danau Teluk dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghadapi patologi politik di Pemilu 2024 adalah jumlah anggota Panwaslu yang terbatas dalam melakukan pengawasan, aturan atau regulasi yang ada pada pihak penyelenggara yaitu aturan dari KPU dan aturan dari Bawaslu yang sering mengalami perubahan, serta lemahnya aturan dan sistem pengawasan dari Bawaslu.

1.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Panwaslu Kecamatan Danau Teluk agar melakukan upaya-upaya yang lebih optimal dan intensif dalam mencegah aksi patologi politik, seperti melakukan patroli rutin, menyediakan pos-pos penjagaan, meningkatkan patroli saat masa kampanye dan masa tenang, sehingga seluruh bentuk patologi politik dapat terdeteksi.
2. Diharapkan kepada Bawaslu Kota Jambi agar memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, seperti menerapkan sistem yang dapat mendeteksi pelanggaran politik dan tidak hanya mengandalkan laporan masyarakat.

